

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164–180.
- Badiul Hadi. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa* (M. Hasan, G. Palayukan, & L. Suryani, Eds.).
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 , (2022).
- Bustami, E. (2019). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Desa Dalam Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur: H. Edwin Bustami, SE., MM. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 2(1), 1–15.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02). <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Erna, H., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana. *Jurnal Riset Akuntansi Kontempore*, 12(2), 100–110.
- Herdiawanto, H., Wasitaatmadja, F. F., & Hamdayana, J. (2019). *Kewarganegaraan dan masyarakat Madani* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Kartika, A., Yasintha, P. N., Wiwin, K., & Wismayanti, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen*, 1(1), 1–9.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, (2022).

- Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513–522.
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Nur, S. W. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 725–739. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Nurfaisal, M. D., & Mutiarin, D. (2019). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 58–70.
- Nursida, N., & Princessa, S. T. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 1(2), 17–28.
- Oktara, L. P., & Wardaya, M. K. (2019). *Buku pintar Bijak Mengelola Dana Desa. Literasi Desa Mandiri*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, (2006).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2014).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2015).
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008).
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).